



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 7, No. 2 Tahun 2024

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v7i2.27444>

Relevansi Konstruksi Politik Identitas Terhadap Pasangan Anies-Muhaimin dalam Pusaran Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024

Rizki Aditya Nugraha

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
rizzkyadtya00@gmail.com

Achmad Nurmandi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
nurmandiachmad@umy.ac.id

Helen Dian Fridayani

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
helen.dian@umy.ac.id

Submitted: June 18th, 2024

Revised: December 29th, 2024

Accepted: February 03th, 2025

Abstract

This study aims to analyse the term identity politics in the 2024 Presidential Election (Pilpres) towards the candidate pair Anies Baswedan and Muhaimin Iskandar. The issue of identity politics is an excess of the 2017 DKI Jakarta Regional Head Election (Pilkada) which involved Anies Baswedan as one of the actors. Frederick Barth's constructivist thought is the theory used to dissect the relevance of the issue in the 2024 presidential election arena. This research is a type of qualitative research using a case study approach and using several news channels as secondary sources. The results showed that the issue of identity politics is still relevant to Anies because the group supporting Anies the DKI Jakarta Pilkada is the same group that supports him in the 2024 presidential election by transforming into Ijtima Ulama and National Figures. The issue of identity politics is also influenced by NU figures because the preferences of NU residents are considered incompatible with Anies supporters.

Keywords: Anies-Muhaimin, identity politics, presidential election

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa penyematan istilah politik identitas pada Pemilihan Presiden (*Pilpres*) 2024 terhadap pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Isu politik identitas adalah eksekusi dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 yang melibatkan Anies Baswedan sebagai salah satu aktornya. Pemikiran konstruktivis Frederick Barth menjadi teori yang digunakan untuk membedah relevansi isu tersebut dalam arena Pilpres 2024. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan menjadikan beberapa kanal berita sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu politik identitas masih relevan disematkan kepada Anies sebab kelompok pendukung Anies ketika Pilkada DKI Jakarta merupakan kelompok yang sama yang mendukungnya pada Pilpres 2024 dengan bertransformasi menjadi Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional. Isu politik identitas juga turut dipengaruhi oleh tokoh-tokoh NU sebab preferensi warga NU yang dinilai tidak sesuai dengan pendukung Anies.

Kata kunci: Anies-Muhaimin, politik identitas, pemilihan presiden

Pendahuluan

Pemilihan Presiden 2024 yang baru usai banyak membawa intrik politik untuk tanah air. Salah satu pasangan calon yang berkontestasi adalah Anies Baswedan sebagai calon Presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai calon Wakil Presiden. Anies Baswedan memiliki rekam jejak Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Muhaimin Iskandar tercatat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Terekam dalam ingatan kolektif warga DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah memainkan isu politik identitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Pernyataan lawan politiknya saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengutip surat Al-Maidah menjadi momentum ofensif untuk pihak Anies Baswedan. Otoritas pihak muslim pun melakukan pembelahan di masyarakat dengan mengangkat isu agama dan menjatuhkan nama Ahok sebagai penista agama. Stigma yang dibangun memperkuat alasan atau ketakutan umat muslim untuk tidak memilih Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pada Pemilihan Presiden 2024, isu politik identitas kembali muncul sebagai sarana mempengaruhi dinamisasi pasangan calon (paslon) dan pendukungnya, tak terkecuali terhadap Anies Baswedan. Pengangkatan isu tersebut masih melibatkan organisasi dan

tokoh yang memiliki kedekatan historis dengan Anies Baswedan, yakni Front Persaudaran Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Sementara itu, penelitian ini dilakukan mengingat Anies Baswedan masih mendapat julukan yang sama seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Pemilihan Presiden 2024, Anies Baswedan masih membawa dukungan dari pihak yang sama di akar rumput. Narasi-narasi pembelah umat oleh tokoh-tokoh Islam membuat Anies Baswedan masih kerap dilabeli memanfaatkan politik identitas. Hal ini direspon sinis dan menjatuhkan Anies Baswedan oleh pihak lawan yang melempar isu politik identitas kepada publik. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus meneliti relevansi julukan tersebut dalam konteks Pemilihan Presiden Indonesia 2024 dan pengaruhnya terhadap penguatan kelompok Islam serta pembelahan di masyarakat. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu mengenai topik politik identitas untuk menemukan kebaruan pada penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas tema politik identitas khususnya dalam konteks Indonesia. Seperti penelitian (Sari, 216) yang membahas kontruksi politik identitas oleh elit politik, sehingga menghasilkan upaya pembangunan dan menegaskan citra diri sebagai seorang muslim terhina untuk membangun politik identitas. Penelitian (Hamid, 2018) mengkaji tentang hubungan dan praktik politik identitas umat muslim dan aliran kepercayaan perjalanan yang terjalin dengan harmonis karena menjunjung tinggi nilai tawakal. Artikel (Hawati et al., 2024) ditemukan bagaimana tokoh Islam dapat memengaruhi proses politik, opini publik, dan dinamika sosial. Penelitian (Panjaitan et al., 2023) menghasilkan temuan bahwa masyarakat kelurahan Sidorejo, Medan Tempung sudah menganggap politik identitas sebagai upaya efektif untuk mendistribusikan kepercayaan kepada calon pejabat publik.

Penelitian yang lain mengenai politik identitas masih seputar tokoh agama yang berkontribusi dalam politik elektoral. Penelitian (Istianah & Saehudin, 2023) menghasilkan bahwa identitas calon pejabat publik mempengaruhi perilaku politik Kiai

di Sukabumi. Penelitian (Juanda & Octo, 2024) menunjukkan potensi intensitas konflik selama Pemilu 2024 yang dapat disebabkan oleh faktor non-elektoral, seperti politik identitas yang dimanfaatkan menjadi strategi politik, yang mengganggu proses pemilihan atau legitimasi hasil. Hasil penelitian (Samosir & Novitasari, 2022) menjelaskan bahwa penggunaan isu politik identitas membuat rakyat muak dan berbahata untuk demokrasi Indonesia. Penelitian lain oleh (Sonny, 2019) menjelaskan bahwa KH Ma'ruf Amin yang terpilih menjadi bakal calon wakil Presiden Joko Widodo disebabkan oleh meruncingnya politik identitas di Indonesia. Senada dengan itu, hasil penelitian (Mujab & Irfansyah, 2020) menunjukkan *personal branding* sebagai tokoh agama, sukses memenangkan kontestasi Pemilu 2019. Strategi politik identitas selaras dengan yang dilakukan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Penelitian (Lestari, 2019) mendukung bahwa dengan kemenangan Anies-Sandi dapat mengakibatkan elit politik memilih calon yang mempunyai latar belakang identitas tertentu untuk menarik simpati pada politik elektoral.

Oleh (Utama & Tanasyah, 2023) politik identitas dipandang tidak dapat menjadi pola dasar untuk mencapai demokrasi yang sejati karena tidak mengandung nilai kebersamaan dan persatuan. Di daerah tertentu politik identitas berkembang sejak reformasi, seperti penelitian (Syuhudi, 2016) yang menunjukkan bahwa politik identitas di Kota Manado berkembang melalui kelompok-kelompok yang merupakan representasi adat Minahasa dan memiliki agenda memenuhi kebutuhan kelompok di arena ekonomi dan politik. Menurut (Wingarta et al., 2021), praktik politik identitas yang diakibatkan oleh ideologi partai yang belum mengakar, berpengaruh terhadap implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Pada Pilkada Bupati Morotai 2011, (Ali, 2019) menunjukkan bahwa politik identitas berbasis agama dapat mengubah preferensi politik pemilih. Penelitian (Mitha Alvia Roshia, Adeline Pastika Muham, 2023) menjelaskan bahwa politik identitas berbasis etnis terjadi dan berhasil membuat seorang calon terpilih menjadi kepala Desa terpilih.

Menurut penelitian (Dhani, 2019), politik identitas dalam kampanye politik menampilkan keberhasilannya sekaligus menggambarkan keburukan pendidikan politik di Indonesia. Pada penelitian (Zamzani Arief & Andriyani, 2023), politik identitas pada Pemilu 2024 sah saja untuk dilakukan asal tidak diagendakan menyudutkan satu pihak, pandangan lain menyatukan isu politik identitas harus dihindari apalagi digunakan, sebab dapat rentan memicu konflik SARA. Hasil penelitian (Arung Triantoro, 2019) menunjukkan kecenderungan praktik politik identitas pada akun media sosial Anies-Sandi menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menampilkan simbol agama Islam. Berkaitan dengan itu, (Fautanu et al., 2020) menunjukkan bahwa politik identitas umat muslim DKI Jakarta khususnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 berlandaskan agama dan merupakan keniscayaan dalam budaya politik. Dalam hasil penelitian (Adam, 2022) gerakan 212 pada perkembangannya berubah orientasi menjadi gerakan politik identitas yang menimbulkan konflik di masyarakat. Menurut (Anam, 2019) umat Islam akan dimobilisasi oleh politik dan mengesampingkan agama lain.

Pada penelitian (Soenjoto, 2019) ditemukan bahwa identitas politik generasi milenial dieksploitasi oleh isu politik identitas. Penelitian (Ardipandanto, 2020) menemukan bahwa bahaya populisme dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 adalah karena pengkotakan isu agama yang diperuncing oleh berbagai pihak dan mengakibatkan situasi politik rentan ditunggangi agenda politik tertentu. Penelitian (Syahrin et al., 2023) menyimpulkan bahwa politik identitas adalah keniscayaan hidup, namun tidak perlu diumbar agar tidak memecah belah keberagaman. Kaijan (Hemay & Munandar, 2016) membuktikan bahwa faktor identitas suku atau sentimen kesukuan, beriringan dengan faktor citra figur, dapat berkontribusi positif untuk membentuk perilaku pemilih. Dalam penelitian (Hakiki, 2011), menemukan bahwa keyakinan agama resmi Indonesia kerap tercampur dengan keyakinan agama lokal, namun kekuasaan politik menganaktirikan agama lokal dan sangat bias agama mayoritas.

Menurut (Kiftiyah, 2019), pasca Pemilu 2019 kontestan politik berupaya melakukan rekonsiliasi, selain kontestan, tokoh agama dibutuhkan untuk membentuk pola pikir publik. Menurut (Supratikno et al., 2023), politik identitas bertentangan dengan hakikat keindonesiaan karena masyarakat yang plural, bukan homogen. Dari hasil analisa (Rahim, 2018), ditemukan bahwa politik identitas merupakan kunci fenomena politik baru dalam demokrasi rasional dan menjadi landasan politik Aceh memperkuat kekuatan politik. Penelitian (Made et al., 2018) menunjukkan dinamisnya gerakan politik identitas masyarakat muslim Bali terkhusus pada situasi mereka menganggap diri sebagai minoritas. Pada penelitian (Daulay et al., 2019), politik identitas dilakukan dengan mendekati tokoh agama dan tokoh adat, serta melakukan pola kegiatan bernuansa agama dan adat.

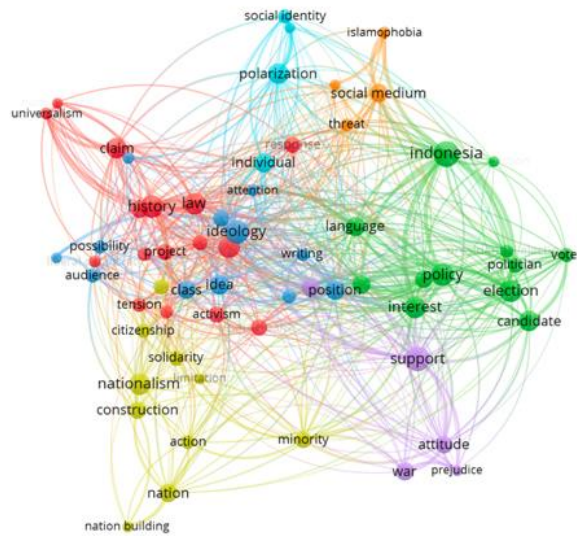
Identitas menurut Manuel Castells dalam (Lestari, 2019), adalah sumber makna diri yang timbul dan ditempelkan oleh individu terhadap diri sendiri, atau dari kelompok kepada kelompok sendiri yang dibangun dengan proses individuasi. Ilmuwan politik, Andrew Heywood mengemukakan bahwa identitas berfungsi menjembatani aspek pribadi dan aspek sosial sehingga individu tertanam dalam konteks partikular dari sosial, budaya, ideologi, dan institusi. Dapat disebut identitas apabila ia diinternalisasi oleh masyarakat di luar dirinya. Identitas mungkin terbentuk hanya jika terdapat perbedaan dalam mengidentifikasi makna individu atau kelompok dibandingkan dengan yang lain. Identitas tidak mungkin eksis apabila tidak ada ruang untuk memperkenalkan. Individu dan kelompok lain adalah ruangan tersebut.

Berdasarkan uraian tinjauan penelitian terdahulu di atas, terdapat 32 penelitian yang membahas topik politik identitas. Beberapa penelitian telah membahas keterlibatan politik identitas dalam aspek etnik dan agama yang berdampak pada Pemilihan Umum. Namun, tidak ada penelitian sebelumnya yang telah mengkaji topik politik identitas dalam aspek etnis dan agama pada fenomena Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024, lebih spesifik mengenai pasangan calon Anies Baswedan-

Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk berkontribusi melengkapi studi tentang politik identitas dalam aspek dan ruang lingkup spesifik yang telah dijelaskan di atas.

Isu politik identitas yang kembali muncul pada Pilpres 2024 menyeret nama Anies Baswedan dan pasangannya sebagai paslon yang menggunakan politik identitas untuk memperoleh dukungan dari kelompok tertentu. Politik identitas dibentuk dari simbol-simbol etnik dan agama yang dimanipulasi untuk kepentingan politik. Dalam kasus ini, politik identitas digunakan oleh lawan politik Anies-Muhaimin untuk mendegradasi elektabilitas paslon. Isu Pilkada DKI Jakarta 2017 yang memuncak pada peristiwa 212 dan pemihakan tokoh-tokoh Islam konservatif menjadikan politik identitas masih tumbuh subur pada paslon tersebut, terutama Anies Baswedan.

Menurut Frederick Barth, identitas agama dan budaya adalah hasil dari proses yang rumit. Simbol kemudian menjadi elemen situasional dalam kehidupan masyarakat. Politik identitas adalah bentuk manipulasi simbol yang berasal dari identitas etnik dan agama dengan menggunakan teori konstruktivisme dan memilih beberapa kanal berita sebagai sumber penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk meneliti relevansi politik identitas dalam arena Pilpres 2024.



Gambar 1. *Network Visualization* (VOSViewer, 2024)

Gambar 1 menampilkan *network visualization* yang diolah menggunakan VosViewer dengan bersumber dari Scopus 2019-2024 dengan kata kunci pencarian “*identity politics*”. Hasil Scopus membentuk tujuh cluster. Cluster 1 (merah): *law, human rights, liberal democracy, participant*. Cluster 2 (hijau): *candidate, democracy, election, elite, interest, policy*. Cluster 3 (biru): *audience, class, ideology*. Cluster 4 (kuning): *citizenship, construction, minority, individual, polarization, social identity*. Cluster 7 (oranye): *majority, social medium, threat*.

Network visualization di atas merupakan rangkuman penelitian terdahulu pada skala internasional yang diperlihatkan dalam bentuk konektivitas jaringan. Uraian *network visualization* di atas adalah hasil olahan penulis menggunakan aplikasi VOSViewer dengan memasukkan kata kunci politik identitas. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa penelitian terdahulu mengenai politik identitas banyak diteliti dalam aspek sekular, seperti hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Kerangka etnis dan agama langka disentuh oleh penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis berkontribusi untuk meneliti politik identitas Anies-Muhaimin pada Pemilihan Umum 2024 dalam kerangka etnis dan agama untuk melengkapi studi politik identitas.

Kerangka Teori

Politik identitas merujuk pada istilah identitas yang bekerja dalam konteks politik. Menurut Agnes Heller, politik identitas adalah politik yang terfokus pada diferensiasi sebagai unsur yang menjamin toleransi, kebebasan, dan kebebasan bermain (*free play*), meskipun melahirkan patron intoleransi, kekerasan, dan pertentangan etnis (Lestari, 2019). Bennett dalam (Mujab & Irfansyah, 2020) menggagas bahwa politik identitas merupakan gerakan sosial baru yang muncul setelah 1960-an, gerakan sosial ini mempoisisikan identitas kelompok sebagai sentral atau menyebabkan masalah antinuklir, lingkungan, dan hak-hak khusus.

Dalam mengkaji politik identitas, Pierre Van Den Bergh (1991) dan Ubed Abdillah (2002) memanfaatkan tiga pendekatan teoritis, yaitu primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme. Primordialisme melihat fenomena identitas (agama, etnis, ras) dalam kerangka sosio-biologis. Kelompok sosial diidentifikasi berdasarkan agama, kebudayaan, gambaran wilayah, bahasa, dan organisasi sosial sebagai kondisi terberi (*given*) dan tak bisa digugat. Pendekatan ini meneruskan bahwa kepentingan individu anggota agama didesain untuk menyokong kepentingan kelompok dan pimpinannya guna memperkuat basis agama (Sari, 2016).

Pendekatan kedua adalah konstruktivis yang memandang identitas budaya dan agama sebagai hasil dari suatu proses yang rumit. Agama dan etnisitas berkembang terus-menerus dan batas keanggotaan kelompok sering dinegosiasikan berkala sesuai dengan tujuan kelompok. Frederick Barth menyebut fenomena ini situasional. Di taraf ini, para aktor berupaya mengeksploitasi simbol budaya dan menunjukkan perilaku kelompok yang dinamis sesuai situasi atau kepentingan pribadi atau sosial. Hal tersebut dianggap penting sebab berkaitan dengan citra diri (*self image*) dan harga diri (*self esteem*) baik individu maupun kelompok (Sari, 2016).

Sementara pendektan instrumentalis menyoroti manipulasi dan mobilisasi politik. Instrumentalisme menjellaskan bahwa identitas etnik dan agama niscaya dijadikan

sarana elit kelompok tersebut untuk memanipulasi identitas sesuai keuntungan mereka sendiri. David brown dan Donal Horowitz memberikan pendapat senada mengenai etnisitas dan agama memang bisa dimanipulasi (instrumentalisme), namun di saat yang bersamaan, secara luas diterima sebagai bawaan (primordialisme) (Sari, 2016).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi, yaitu menelusuri data dan informasi berbentuk dokumen, arsip, buku, artikel ilmiah, artikel berita, angka dan gambar yang dapat memberikan manfaat untuk penelitian. Sumber utama penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu pemberitaan berbagai kanal media massa selama periode 2017-2024, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Tabel 1. Sumber data

Media Massa Daring	Intensitas
CNN Indonesia	12
Detik.com	10
Kompas.com	12
Liputan 6	10
Tribunnews	10

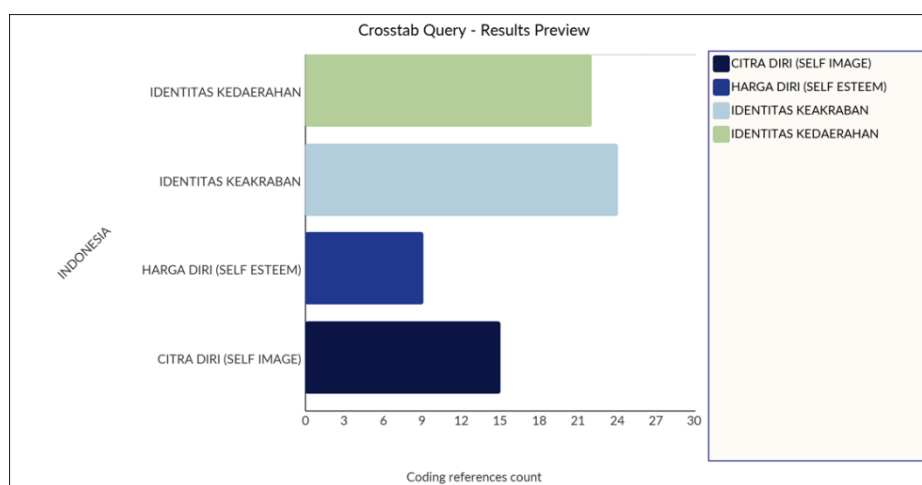
Sumber data media daring. Penulis (2024)

Meskipun demikian, terdapat beberapa limitasi dari penelitian ini: (1) politik identitas yang terjadi pada Pemilihan Presidendonesia 2024 melingkupi 3 paslon sekaligus. Namun, Penelitian ini berfokus meneliti salah satu paslon, yaitu Anies-Muhaimin. (2) politik identitasdijelaskan dalam kerangka Pemilihan Presiden Indonesia 2024, tidak di luar itu. (3) penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari lima media pemberitaan, yaitu CNN Indonesia dengan jumlah 12 berita, Detik.com berjumlah

10 berita, Kompas.com berjumlah 12 berita, Liputan 6 berjumlah 10 berita, dan Tribunnews berjumlah 10 berita.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah politik identitas yang dibeli kepada Anies Baswedan tentu berpengaruh terhadap kiprahnya menjelang Pilpres 2024. Hal ini otomatis berimplikasi pada paslonnya, yaitu Muhaimin Iskandar. Fenomena ini kembali diteliti dalam konteks Pilpres 2024 ditinjau dengan memanfaatkan teori konstruktivis Barth. Relevansi isu terhadap Anies Baswedan diteliti dengan empat indikator. Konstruksi Pemuka Agama yang melingkupi identitas keakraban dan identitas kedaerahan. Kedua, perilaku pemilih yang dibingkai oleh harga diri (*self esteem*), dan citra diri (*self image*).



Gambar 2. Crosstab Query (Nvivo 14, 2024)

Diagram batang di atas menunjukkan hasil pengolahan data berbasis kanal media pemberitaan dengan software Nvivo 14. Diagram menunjukkan empat parameter yang mana identitas keakraban menjadi parameter dengan presentasi tertinggi, yaitu 24 kali muncul di berbagai kanal media pemberitaan, disusul dengan identitas kedaerahan, citra diri, dan harga diri. Identitas keakraban menjadi parameter tertinggi sebab kemunculan dan pemeliharaan politik identitas banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbau identitas keakraban.

di mana-mana. Bahkan, Ia terlihat menunggangi isu supaya tetap menjaga relevansi politiknya di ruang publik.

Sejak mencalonkan diri sebagai Presiden untuk Pilpres 2024, Anies Baswedan dituding memainkan politik identitas oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) seperti yang dilakukannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 (Indonesia, 2023a)(Indonesia, 2023a). Hal ini dilakukan lawan politik Anies untuk merawat ingatan mengenai aksi 212 yang banyak memuat narasi intoleran. Dengan ini, budaya ketakutan masyarakat terhadap ormas Islam konservatif akan subur. Teori konstruktivis Frederick Barth adalah teori yang digunakan untuk mengkaji fenomena fabrikasi politik identitas yang melekat pada Anies Baswedan sehingga menggiring paslonnya.

Meskipun tidak menolak secara frontal, Anies Baswedan berupaya memperluas jangkauannya dengan menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dekat dengan NU, Muhaimin Iskandar. NU yang dikenal sebagai organisasi Islam moderat dipersatukan oleh tujuan politik bersama dengan kelompok Islam konservatif. Hal ini sekaligus mengupayakan relevansi Anies terhadap seluruh pemilih beragama Islam.

B. Anies-Muhaimin yang dikonstruksikan Pemuka Agama

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertarung di kontestasi politik bersama dengan dua pasangan calon lainnya, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pasangan Anies-Imin atau diakronim Amin, merupakan dua orang yang memiliki relevansi historis dengan politik identitas etnik dan agama. Anies Baswedan pernah memanfaatkan aksi 212 dari gabungan kelompok Islam berhaluan konservatif dan para partisannya pada momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk menurunkan elektabilitas pasangan calon lainnya. Sedangkan Muhaimin Iskandar sering menggunakan otoritas pemuka agama lebih spesifik dalam ruang lingkup organisasi Islam, Nahdatul Ulama (NU).

1. Keakraban Anies dengan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional

Kalangan instrumentalisme menegaskan bahwa identitas etnik dan agama niscaya dijadikan sarana kepentingan elit politik demi keuntungan elit politik itu sendiri. Narasi dan simbol agama dieksploitasi dan dimanipulasi oleh elit politik tak terkecuali untuk memenangkan Pemilihan Umum.

Forum Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional dibentuk oleh tiga pihak, Front Persaudaraan Islam, Persaudaraan Alumni 212, dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) serta diikuti oleh 600 peserta perwakilan dari seluruh Indonesia. Kelompok Islam tersebut memiliki sejarah dengan Anies Baswedan, setidaknya dengan nama yang berbeda. Front Pembela Islam dilarang oleh Pemerintah dan mengganti namanya menjadi Front Persaudaraan Islam (Berutu, 2021) dan Persaudaraan Alumni 212 yang pernah melakukan aksi besar-besaran pada momentum Pilkada DKI Jakarta 2017.

Anies Baswedan cenderung menerima dukungan yang dihadirkan oleh golongan Islam konservatif. Keakraban Anies dengan kelompok Islam konservatif masih dipelihara oleh kedua belah pihak dengan tidak menegasikan satu sama lain. Pandangan primordial yang menjadi magnet antara keduanya yang mana Anies adalah tokoh berdarah Islam Arab dan lebih dekat dengan citra Islam. Di sisi lain, golongan Islam konservatif sangat menghormati dan menghargai keturunan Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh berdarah Arab Islam lainnya, bahkan pimpinan organisasi tersebut biasanya merupakan keturunan Nabi Muhammad atau Habib. Spektrum pertemuan itu memelihara identitas keakraban dan asal-usul yang dimiliki oleh tokoh politik dan pendukungnya.

Pimpinan Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab juga memiliki sejarah dalam memenangkan Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017 (Anwar, 2024). Habib Rizieq Shihab turut menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Seruan itu disampaikan oleh Habib Rizieq dalam acara Istighosah Kubro Persaudaraan Alumni (PA) 212, di Kemayoran,

Jakarta Pusat, 8 Februari 2024 (Hikmah, 2024). Habib Rizieq menyosialisasikan keputusan ijtima ulama dan tokoh nasional setelah ditandatanganinya pakta integritas oleh Anies-Muhaimin.

Aksi bela Islam 212 menurut Septiana dalam (Adam, 2022), berorientasi pragmatis yang bersifat politis, yaitu untuk menurunkan elektabilitas Ahok di saat bersamaan mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Keterlibatan Habib Rizieq ketika Anies Baswedan maju sebagai calon pemimpin masih konsisten sejak tahun 2017. Dukungan Islam konservatif masih terawat hingga Pilpres Indonesia 2024.

Melalui pakta integritas Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang ditandatangani paslon Anies-Muhaimin, komitmen keagamaan bertransformasi menjadi instrument untuk mendongkrak dukungan terhadap paslon. Pengambilan kekuatan dari spektrum identitas agama mengantarkan keunggulan dari segmentasi pemilih yang memiliki kemiripan atau menyetujui simbol-simbol tersebut. Konsekuensinya adalah pemilih dari spektrum yang lain otomatis tersingkirkan.

Keterlibatan tokoh pemuka agama seperti Habib Rizieq Shihab dalam menyosialisasikan paslon dapat dilihat sebagai kampanye politik yang diselimuti oleh narasi-narasi keagamaan dan kebangsaan. Simbol-simbol tersebut kemudian dibentuk dan membentuk dalam kesadaran perorangan. Interpretasi atas simbol akan terbangun dengan fasilitas pengetahuan dan rasa solidaritas. Hal ini membawa bias makna terhadap fenomena tersebut, namun membawa dorongan solidaritas yang identik.

Menurut Agnes Heller, politik identitas adalah politik yang terfokus pada diferensiasi sebagai unsur yang menjamin toleransi, kebebasan, dan kebebasan bermain (*free play*), meskipun melahirkan patron intoleransi, kekerasan, dan pertentangan etnis (Lestari, 2019). Aksi 212 di Monumen Nasional (Monas) adalah aksi yang mempertegas pertentangan antara kelompok Islam dan non-

Islam. Fenomena ini otomatis membedakan pendukung Anies dan Ahok yang waktu itu bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Massa ini dibawa kembali oleh Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Pada November 2023, kelompok yang menyatakan diri sebagai Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional menggelar rapat yang menghasilkan mufakat untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 (BBC News Indonesia, 2023). Pengamat politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo mengatakan posisi keduanya yang didukung oleh Ijtima Ulama menguatkan citra pasangan religius yang membawa suara umat Islam.

2. Muhaimin Iskandar dan Pengaruh Tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Nahdatul Ulama (NU)

Mufakat oleh Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional menemukan afiliasi yang dekat terhadap pandangan pemimpin yang religius. Kriteria pemimpin religius mempersempit pandangan yang berpotensi dekat dengan kriteria pemimpin yang lain. Kendati diferensiasi politik tidak dapat dihindari, dengan menggandeng Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan berupaya lebih leluasa terhadap semua golongan Islam, tak terkecuali kelompok Islam tradisional yang seringkali direpresentasikan oleh organisasi Islam NU.

Oleh pihak lain, dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak masyarakat untuk menelusuri rekam jejak calon pemimpin pada Pilpres 2024 yang pernah menggunakan agama sebagai alat politik. “Jika iya, maka jangan dipilih.” Tutar Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut (CNN Indonesia, 2023). Secara bersamaan, Gus Yaqut menggunakan otoritasnya sebagai Menteri Agama untuk mempengaruhi publik.

Gus Yaqut merupakan tokoh NU yang sudah lama berkiprah di dunia politik tanah air. Bukan sekadar tokoh NU biasa, ia adalah saudara kandung dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Tsaquf. Keduanya memiliki darah NU yang kental dari leluhurnya.

Pernyataan Gus Yaqut tersebut secara tidak langsung menolak Anies Baswedan yang pernah menggunakan agama pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini tentu akan mempengaruhi opini publik yang setia dengan otoritas keagamaan versi negara mengingat Gus Yaqut juga seorang Menteri Agama Republik Indonesia. Secara politik, Gus Yaqut dalam memberikan keterangan tentu dipengaruhi oleh intensi kepartaian atau keormasan.

Tak pelak, NU dan PKB memiliki hubungan yang sangat dekat. PKB sendiri lahir dari rahim NU. Jadi, tidak heran jika PKB menjadi wadah politik bagi kader Nahdatul Ulama. Lebih jauh lagi, PKB bisa dikatakan sebagai wadah perjuangan politik Nahdatul Ulama.

Menjelang Pemilihan Presiden 2024, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsauq, memberikan instruksi untuk menghindari politik praktis mengontaminasi tubuh Nahdatul Ulama. NU secara lembaga tidak terlibat dalam kampanye atau mendukung salah satu paslon dalam pilpres 2024 (NU ONLINE, 2024). Lain halnya dengan pribadi pengurus NU, tidak ada yang bisa melarang seseorang untuk memberikan dukungan politik kepada siapapun. Kondisi itu bukan tanpa syarat, Gus Yahya meneruskan apabila ingin terlibat dalam politik praktis, maka pengurus harus berstatus sebagai pengurus nonaktif atau mengundurkan diri dari jabatan kepengurusan NU.

Kebijakan Ketua Umum PBNU memberikan dinding yang jelas menyikapi hubungan NU dan PKB. NU secara kelembagaan tidak lagi mendukung perjuangan politik PKB, lebih luas, perjuangan politik dari pihak manapun. Penonaktifan jabatan pun sudah terjadi ketika Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur disinyalir mendukung salah satu paslon pada akhir tahun 2023.

Hal itu membuat dukungan dari pihak NU tidak bisa dikonversi secara fleksibel untuk PKB. Legitimasi sebagai pihak yang membawa citra ke-NU-an harus ditanggalkan agar bisa berkontribusi pada politik praktis. Pemilih akar

rumpun tentu saja akan dipengaruhi oleh tokoh yang tampil dengan membawa identitas, namun pada saat yang lain menanggalkannya.

Di sisi lain, tokoh-tokoh NU masih bisa mengemukakan narasi politik dengan mengatasnamakan preferensi ke-NU-an. Pada Januari 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh warga NU menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024. Tidak sembarangan memilih, paslon harus sesuai dengan mazhab dan cara berpikir NU. Gus Ipul juga menegaskan untuk tidak memilih paslon yang bersebarang dengan cara berpikir orang NU seperti yang didukung oleh Abu Bakar Baasyir dan Amin Rais (Arifin, 2024).

Abu Bakar Baasyir adalah seorang mantan narapidana atas tuduhan terhadap aksi bom Bali, tahun 2014. Abu Bakar Baasyir mengasuh Pondok Pesantren dengan mendidik santrinya menolak Pancasila sebagai asas tunggal, melarang menghormati bendera merah putih dan menyatakan kalau itu adalah perbuatan syirik. Menjelang Pemilihan Presiden 2024, beredar pesan suara (*voice note*) berisi dukungan Abu Bakar Baasyir terhadap pasangan Anies-Muhaimin (Amin).

Abu Bakar Baasyir adalah seorang mantan narapidana atas tuduhan terhadap aksi bom Bali, tahun 2014. Abu Bakar Baasyir mengasuh Pondok Pesantren dengan mendidik santrinya menolak Pancasila sebagai asas tunggal, melarang menghormati bendera merah putih dan menyatakan kalau itu adalah perbuatan syirik. Menjelang Pemilihan Presiden 2024, beredar pesan suara (*voice note*) berisi dukungan Abu Bakar Baasyir terhadap pasangan Anies-Muhaimin (Amin).

Dilansir dari tempo, pesan suara yang beredar di beberapa platform media sosial seperti WhatsApp dan Youtube tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh anak Abu Bakar Baasyir sendiri, Abdul Rohim. Menurut Abu Bakar Baasyir,

pasangan Amin adalah calon pemimpin yang paling memahami Islam dibanding pasangan yang lainnya (Tempo, 2024).

Tak hanya Gus Ipul, putri mendiang Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Zannubah Arrifah Chafsoh atau Yenny Wahid sejalan dengan pernyataan Gus Ipul. Yenny Wahid sendiri memiliki perseteruan yang panjang dengan Cak Imin yang memperebutkan PKB. Cak Imin dan Yenny Wahid punya versi masing-masing tentang warisan PKB-nya Gus Dur. Keduanya pun saling menegasikan satu sama lain dalam hal politik. Terbukti dengan Yenny Wahid yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun satu hal yang pasti, PKB selalu berada di tangan Cak Imin.

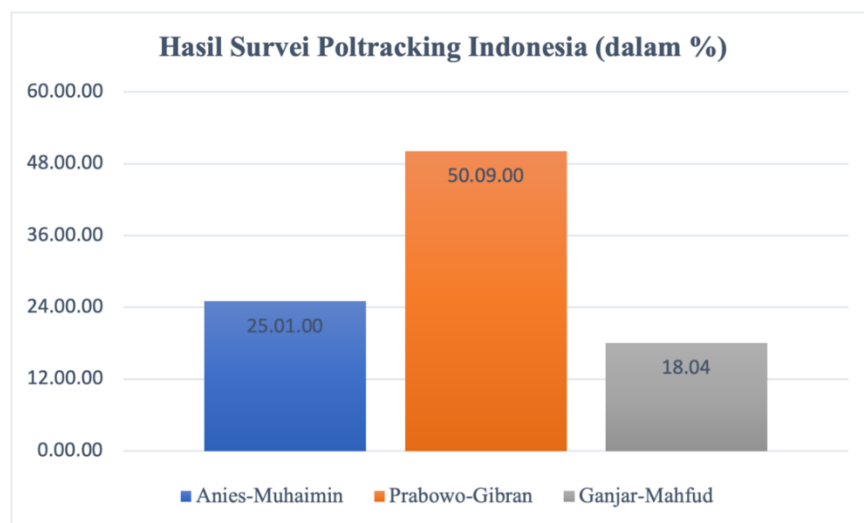
Pernyataan Gus Ipul di atas mencoba mempengaruhi kekuatan politik pasangan Amin melalui tokoh pendukungnya. Gus Ipul mengambil patokan paradigma NU yang berseberangan dengan tokoh pendukung Amin. Cak Imin sebagai tokoh PKB dibenturkan dengan narasi tokoh NU yang tidak menyetujui pendukung pasangan Amin. Pembangunan narasi oleh Gus Ipul menyimpulkan bahwa Cak Imin sebagai calon Wakil Presiden (Cawapres) tidak mendapatkan dukungan dari tokoh NU melalui konstruksi narasi.

Pendukung pasangan Amin yang berasal dari kelompok Islam radikal dibantah oleh petinggi NU dengan argumen normatif. Dengan kata lain, strategi menggaet pemilih dari kelompok Islam moderat seperti NU yang termanifestasi menjadi pendukung PKB tidak sepenuhnya berhasil. Meskipun tidak terjadi keputusan yang bulat, harus dipahami bahwa PKB sebagai partai masih eksis hingga saat ini. Konsekuensinya adalah selektifitas pemilih yang terjadi dari masyarakat NU yang masih setia dengan PKB sebagai partainya NU.

C. Harga Diri dan Citra Diri Pemilih Anies-Muhaimin

Dari sekian banyak identitas yang dapat ditampilkan, identitas berbasis etnik dan agama selalu sukses menarik simpati dalam diri seseorang. Dalam pandangan konstruktivis Frederick Barth, konsep identitas berjalan dinamis dengan kontribusi pertukaran simbol, komunikasi politik, dan pembentukan paham yang menuruti wacana besar perseorangan atau kelompok. Tidak terkecuali dengan budaya dominan atau budaya arus utama yang mempengaruhi budaya minoritas atau pinggiran. Budaya kelompok minoritas kemudian akan diintervensi karena tekanan oleh lingkungan sekitar.

Meninjau Pilpres 2024, sentimen citra diri sebagai muslim tidak dipicu oleh kalimat berbau agama di luar konteks elektoral. Bahkan tidak terlihat ada penguatan umat muslim yang condong untuk salah satu paslon. Sejumlah hasil survei menunjukkan bahwa pemilih muslim cenderung mengunggulkan Prabowo-Gibran, ketimbang Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Berikut merupakan hasil survei *Poltracking* Indonesia yang dirilis pada 9 Februari 2024 (AR, 2024).



Gambar 4. Diagram Batang (Poltracking Indonesia, 2024)

Prabowo-Gibran hampir selalu berada di angka 45% ke atas, disusul baik oleh Anies-Muhaimin atau Ganjar-Mahfud. Survei oleh *Poltracking* Indonesia dan Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2023 menunjukkan segmentasi organisasi Islam yang mendukung setiap paslon (Indonesia, 2023). Organisasi NU dan Muhammadiyah secara bersamaan dominan mendukung Prabowo-Gibran sedangkan kategori ormas Islam lainnya dipimpin oleh Anies-Muhaimin.

Melihat distribusi pendukung yang begitu cairnya dari beberapa segmentasi umat Islam, menerangkan pemusatan dan penunggangan wacana yang memanfaatkan politik identitas tergolong tidak signifikan. Citra diri muslim tidak demikian berhasil memusatkan suara dominan umat muslim terhadap salah satu paslon. Dominasi yang gagal berkonsekuensi mematahkan wacana elit politik, segmentasi umat muslim terhadap jagoannya yang sebegitu cair memberikan pandangan bahwa solidaritas kelompok berbasis etnik dan agama juga tidak dapat terbentuk. Otomatis, harga diri muslim yang membentuk solidaritas kelompok tidak muncul dengan signifikan di permukaan. Disebabkan karena isu tentang agama dalam arena politik tidak menguat. Dalam menganalisa deskripsi di atas, penulis menemukan relevansinya dengan hasil pengolahan data Nvivo.

Hasil pengolahan data oleh penulis menggunakan Nvivo menunjukkan bahwa politik identitas Anies-Muhaimin didominasi oleh pengaruh pemuka agama dibanding konstruksi pemilih. Mengambil pandangan konstruktivis, hal ini selaras bahwa masyarakat adalah objek yang dimanipulasi melalui simbol etnik dan agama. Adapun pengolahan data menggunakan Nvivo menghasilkan sebuah world cloud yang menampilkan kata 'anies' sebagai kata yang paling sering muncul. Diskursus tentang politik identitas pada Pilpres 2024 paling sering menyeret Anies Baswedan dibanding pasangannya, Muhaimin Iskandar. Kontra narasi dari tokoh NU juga disebabkan oleh Anies yang berdiri satu kubu dengan Muhaimin Iskandar.

Pandangan konstruktivis Barth, identitas etnis atau agama adalah hasil dari proses yang rumit di mana batasan-batasan mengenai simbol etnik terus-menerus

dibangun melalui mitologi, sejarah, arsip masa lalu, dan pengalaman. Dalam konteks ini, penyematan isu politik identitas terhadap Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dibangun oleh lawan politik berdasarkan pengalaman publik yang menyoroti isu yang sama pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Keberpihakan tokoh dan ormas Islam konservatif kepada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menandakan relevansinya terhadap isu politik identitas. Batasan-batasan mengenai identitas kelompok Islam konservatif dalam konteks Pilpres 2024 dikerucutkan sebagai pendukung Anies Baswedan yang loyal sekaligus membangkitkan ingatan tentang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Barth berasumsi, kelompok etnik dianggap sebagai identitas kebudayaan apabila memiliki karakteristik yang kuat. Kelanggengan unit budaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya unit budaya itu sendiri adalah aspek yang digunakan untuk memeriksa karakteristik kelompok etnik. Penguatan kelompok Islam konservatif sebagai pendukung Anies Baswedan sejak Pilkada 2017 menunjukkan konsistensi atau budaya politik yang dipertahankan. Faktornya adalah kedekatan Anies Baswedan dengan aktor dan petinggi FPI, Habib Rizieq Shihab serta sokongan dari tokoh-tokoh dengan aliran serupa.

Kesimpulan

Pilpres 2024 menghasilkan pembagian kelompok yang begitu dinamis dan rentan berpindah-pindah. Anies Baswedan yang maju sebagai salah satu calon, masih membawa penyokongnya dari golongan Islam konservatif pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini menjadikan Anies masih terjebak pada isu politik identitas. Meskipun demikian, tidak terjadi peruncingan umat Islam yang dimulai oleh kelompok Islam. Kehadiran Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies, tidak membawa dampak signifikan terhadap citra moderat dari paslon nomor urut 1. Wacana elit untuk membentuk politik identitas sebagai label untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024 tidak sepenuhnya sukses dijalankan.

Keterlibatan tokoh-tokoh NU turut menghiasi dinamika politik identitas pada Pilpres 2024. PKB tidak lagi menjadi wadah politik warga NU melalui pernyataan Ketua Umum PBNU, Gus Yaqut. Ditambah narasi-narasi yang menggunakan preferensi ke-NU-an mencoba menggagalkan pendulangan dukungan dari kelompok Islam moderat. Dengan kata lain, bukan hanya tidak berkontribusi mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres, tokoh-tokoh NU juga secara tidak langsung membangun kembali wacana politik identitas pada Pilpres 2024.

Pandangan konstruktivis Barth menyatakan bahwa identitas etnis atau agama dibentuk oleh mitologi, sejarah, dan pengalaman. Pada Pilpres 2024, para penentang menekankan isu politik identitas terhadap Anies Baswedan, dengan mengutip Pilkada DKI Jakarta 2017. Kelompok Islam konservatif mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menyoroti relevansinya dengan politik identitas. Kelanggengan unit budaya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan cara untuk membentuk identitas kelompok etnik. Penguatan kelompok Islam konservatif sebagai pendukung Anies Baswedan sejak Pilkada 2017 menunjukkan konsistensi dalam budaya politik, yang dipengaruhi oleh kedekatannya dengan Habib Rizieq Shihab. Dengan kata lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyematan isu politik identitas terhadap paslon Anies-Muhaimin, khususnya Anies Baswedan masih relevan hingga Pilpres 2024.

Referensi

- Adam, Y.F. (2022). Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 6 (2), 88-103. <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4395>
- Ali, S. (2019). Politik Identitas Agama (Studi kasus politisasi agama pada pemilihan Bupati Morotai 2011). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6 (1), 22-34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3626733>
- Anam, H. F. (2019). *Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia*. *Politea*, 2(2), 181. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5953>
- Anwar, I. C. (2024). *Habib Rizieq Dukung Capres Siapa di Pemilu 2024, Apakah Anies?* *Tirto.Id*. <https://tirto.id/habib-rizieq-dukung-capres-siapa-di-pemilu-2024-apakah->

- AR, H. Y. (2024). *Rilis Temuan Survei Nasional Tatap Muka Poltracking Indonesia: SIAPA PEMENANG PEMILU 2024?* Poltracking Indonesia. <https://poltracking.com/rilis-temuan-survei-nasional-tatap-muka-poltracking-indonesia-siapa-pemenang-pemilu-2024/>
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populime [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43-63. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Arifin, M. (2024). *Sekjen PBNU: Jangan Pilih Calon yang Didukung Abu Bakar Ba'asyir*. Detiknews. <https://www.detik.com/jatimx/berita/d-7145046/sekjen-pbnu-jangan-pilih-calon-yang-didukung-abu-bakar-baasyir>
- BBC News Indonesia. (2023). Pilpres 2024: Seberapa kuat dukungan Ijtima Ulama mengerek elektabilitas Anies-Cak Imin? Bbc. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjep15d7doo>
- Berutu, S. A. (2024). *FPI Ganti Nama Lagi, Front Persatuan Islam Jadi Front Persaudaraan Islam*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5321568/fpi-ganti-nama-lagi-front-persatuan-islam-jadi-front-persaudaraan-islam>
- CNN Indonesia. (2023). *Yaqut Minta Cek Rekam Jejak Capres: Pemecah Belah Umat Jangan Dipilih*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230903202348-617-994235/yaqut-minta-cek-rekam-jejak-capres-pemecah-belah-umat-jangan-dipilih>
- Dauly, S. M., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2230>
- Dhani, F. W. (2019). KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PILKADA. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 139-142. <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/4>
- Fautanu, I., M, B., & Gunawan, H. (2020). Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholis Madjid. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 87-112. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8146>
- Hakiki, K. M. (2011). Politik Identitas Agama Lokal: Studi Kasus Aliran Kebatinan. *Al-Adyan*, XI(1), 159-174.

- Hamid, A. L. (2018). Studi tentang Aliran Kepercayaan Perjalanan Ciparay Bandung. *Journal for Islamic Studies*, 1(2), 113-130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554864>
- Hawati, D. M. S., Maulana, D. A., Nurfajri, E. P., Kusuma, R., & Nurjaman, A. R. (2024). DAMPAK POLITIK IDENTITAS KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(3), 1-12.
- Hikmah, N. Y. (2024). *Habib Rizieq Shihab Serukan Umat Islam Pilih Anies-Cak Imin, dan Caleg Pendukung 01*. Wartakota Tribunnews. <https://wartakota.tribunnews.com/2024/02/09/habib-rizieq-shihab-serukan-umat-islam-pilih-anies-cak-imin-dan-caleg-pendukung-01>
- Indonesia, C. (2023b). Elektabilitas Capres-Cawapres di Segmen Ormas Islam Berbagai Survei. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231208122012-617-1034590/elektabilitas-capres-cawapres-di-segmen-ormas-islam-berbagai-survei>
- Istianah, R., & Saehudin. (2023). Politik Identitas Dan Perilaku Politik Kiai Di Kota Sukabumi Menjelang Pemilihan Umum 2024. *ELECTORAL GOVERNANCE: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 233-250. www.journal.kpu.go.id
- Juanda, & Octo, I. (2024). Politik identitas dan alat pemenangan kontestasi dalam Pemilu yang akan datang. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 1-10.
- Kiftiyah, A. (2019). Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Indonesia Reconciliation Efforts of Identity Politics Post of Election 2019 in Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1). 63-75
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12. <https://doi.org/10.58258/jupe.v4i4.677>
- Made, I. G., Suta, A., & Dewi, K. S. (2018). DINAMIKA POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT MUSLIM BALI PADA PILGUB TAHUN 2018. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 3(1), 40-57.
- Mitha Alvia Rosha, Adeline Pastika Muham, P. Y. D. J. I. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Budaya Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Nama Ukur Utara Langkat. *Mediation: Journal Of Law*, 2(1), 31-37. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index>
- Mujab, S., & Irfansyah, A. (2020). Komunikasi Politik Identitas K.H. Ma'ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019. *Warta ISKI*, 3(10), 54-66. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v3i01.46>
- Nelfira, W. (2023). *Anies Baswedan Tak Khawatir Dilabeli Politik Identitas*. Liputan6.Com.

<https://www.liputan6.com/pemilu/read/5464018/anies-baswedan-tak-khawatir-dilabeli-politik-identitas?page=2>

- NU ONLINE. (2024). Gus Yahya Tegaskan NU Tidak Dukung Mendukung Pilpres 2024. Nu.or.id.<https://www.nu.or.id/nasional/gus-yahya-tegaskan-nu-tidak-terlibat-dukung-mendukung-pilpres-2024-PuXAh>
- Panjaitan, P. A., Ramadhania, J. A., Gaol, R. S. L., Sidebang, D. D., & Ivanna, J. (2023). Analisis Politik Identitas Terhadap Pemilu (Studi Kasus Di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 8744-8752.<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Rahim, T. A. (2018). ANALISIS ACEH DAN PERSOALAN POLITIK IDENTITAS. *Jurnal Ceuthee*, 01(03), 5-24.[http://repro.iain-tulungagung.ac.id/5510/BAB 2.pdf](http://repro.iain-tulungagung.ac.id/5510/BAB%202.pdf)
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332-346.<https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1052>
- Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 145-156
- Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi Isu Politik Identitas terhadap Identitas Politik pada Generasi Milenial Indonesia di Era 4.0. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 187-217.<https://doi.org/10.21580/jish.42.5223>
- Sonny. (2019). Peta Politik Identitas Di Indonesia: Sebagai Bakal Cawapres Bakal Capres Inkumben Joko Widodo Pada Pilpres 2019. *Renaissance*, 4(01), 443-455.
- Supratikno, A., Teologi, F., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia. *SAMI: Jurnal Sosial-Keagamaan Dan Teologi Di Indonesia*, 1(1), 1-21.
- Syahrin, A. A., Noviani, F., Nur, I., & Idris, M. (2023). Kerukunan Masyarakat Multikultural Pasca Kontestasi Politik Identitas Saat Pilkada Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 the Harmony of Multicultural Societies in the Nuances of Identity Politics Post 2018 Governor Elections West Kalimantan. *Jurnal HARMONI*, 22(1), 117-142.<https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.676>
- Syuhudi, M. I. (2016). Geliat Politik Identitas di Kota Manado. Hamroni, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 15(2), 56-66.
- Tempo. (2024). Benar, Voice Note yang Diklaim Suara Abu Bakar Ba'asyir terkait Pilpres

2024. Tempo.Co.

- Utama, S. B., & Tanasyah, Y. (2023). The impact of identity politics on democracy and religious system in Indonesia. *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama...*, 9(3), 661-673. <https://sttpb.ac.id/ejournal/index.php/kurios/article/view/763> <https://sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/download/763/309>
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117-124. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>
- Zamzani Arief, F., & Andriyani, L. (2023). Pandangan Elit Masyarakat Desa Cicalengka Terhadap Isu Politik Identitas dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(08), 40-50. <https://pemilu2019.kpu.go.id/>